

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIKI DESA (BUMDes) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KAMPUNG HOLTEKAMP DISTRIK MUARA TAMI KOTA JAYAPURA

Syamsudin Usman

Program Studi Ilmu pemerintahan
Fakultas Ekonomi, Sastra dan Sosial Politik
Universitas Sains dan Teknologi Jayapura
Jl. Sentani – Padang Bulan Jayapura, 99351
syamusman01@gmail.com

ABSTRA

BUMDes Kampung Holtekamp didirikan dengan tujuan meningkatkan ekonomi desa, pendapatan lokal, dan pengelolaan sumber daya setempat. Fungsinya adalah sebagai pilar utama dalam memperkuat otonomi dan kesejahteraan desa. Melalui kebijakan-kebijakan yang dibuatnya, BUMDes berperan penting dalam mengarahkan pembangunan di Kampung Holtekamp. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah dalam perencanaan pembangunan di kawasan tersebut. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan wawancara, pengamatan, dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Stakeholder dan masyarakat Kampung Holtekamp menjadi sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan demikian, BUMDes menjadi instrumen utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata di desa, mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kata Kunci : *Badan Usaha Milik Desa, Pendapatan Asli Desa, Kesejahteraan Masyarakat*

ABSTRACT

The Village-Owned Enterprises (BUMDes) are established to enhance the rural economy, increase local income, and manage the village's potential in line with community needs, thus becoming the backbone of rural growth and economic equality. The role of BUMDes is to strengthen village autonomy and promote community welfare. The existence of BUMDes is intended to encourage village governments to harness their essential potential through their capabilities and authority. The policies formulated by BUMDes in Kampung Holtekamp play a strategic role in rural development planning. One of the policies implemented is in the development planning of Kampung Holtekamp. This type of research is descriptive qualitative, employing data collection techniques such as interviews, observations, and literature reviews. Sources of information consist of stakeholders and the community in Kampung Holtekamp.

Keywords : *Village Owned Enterprises, Village Original Income, Community Welfare.*

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pemerintah memberikan bantuan sejumlah dana kepada masyarakat desa guna merangsang masyarakat untuk ikut serta aktif dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, desa memerlukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar desa nantinya mampu meningkatkan pendapatan desa .

Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerahpun mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan. 3. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

Tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan menarik masyarakat sehingga secara perlahan angka kemiskinan akan menurun.

Pengorganisasian (organizing) merupakan proses penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang di milikinya, dan lingkungan yang melingkupnya. Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola asset ekonomi di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Dalam konteks demikian, BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, tentang desa, yaitu desa merupakan agen

pemerintah yang paling depan dalam melaksanakan pembangunan karena berkenan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pendapatan Asli Desa (PADes), peranan BUMDes adalah sebagai instrumen penguatan otonomi desa dan sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat. Keberadaan BUMDes untuk dapat mendorong pemerintah desa dan potensi dasarnya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa. (Ibrahim, 2018:7)

Bedasarkan keputusan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK). Provinsi Papua memastikan dana desa di bumi cenderawasih lebih banyak digunakan untuk membangun BUMDes maka salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung Holtekamp adalah dalam mewujudkan otonomi desa mendorong perekonomian di kampung Holtekamp.

Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008:195) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu / pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Leo Agustino, (2008: 138) dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program, atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut sebagai kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. (Nugroho Riant. D, 2006: 494).

Menurut Syauckani (2002; 259) implementasi dapat dikatakan salah satu proses kebijakan publik dalam suatu pemerintahan, biasanya sebuah implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijaksanaan ditetapkan, maka dari pemahaman tersebut dapat dikatakan bahwa implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijaksanaan kepada masyarakat sehingga kebijaksanaan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, pertama, persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan intervensi dari kebijaksanaan

tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan yang ketiga adalah bagaimana mengantarkan kebijaksanaan tersebut secara konkrit ke masyarakat.

Menurut Wilson dalam Soenarko (2005:180) lebih sulit melaksanakan suatu undang-undang dasar atau peraturan-peraturan dibandingkan dengan membentuknya. Mengenai pelaksanaan (implementation) suatu kebijaksanaan, sesungguhnya sudah dipikirkan dan dipertimbangkan sejak kebijaksanaan tersebut dalam perumusan dalam proses penetapannya. Namun, perlu pula kita ketahui dengan baik bagaimana pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah itu harus dilakukan.

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antar pelaksana/penerapan kebijakan dengan desain, tujuan sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak atau hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi. Untuk memperlancar implementasi kebijakan, perlu dilakukan diseminasi dengan baik.

Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat, yakni: (1) adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlunya secara moral mematuhi undang-undang yang dibuat oleh pihak berwenang; (2) adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakan dianggap logis; (3) keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah; (4) awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial, namun dengan berjalannya waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Keberhasilan implementasi dapat dipengaruhi faktor-faktor yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Menurut Edwards dalam Subarsono (2011:90) berpendapat bahwa faktor-faktor keberhasilan implementasi kebijakan terdiri atas komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

A. Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai "proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan". Informasi mengenai kebijakan publik menurut perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan

dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. (Widodo 2010: Nugroho 2011, Pearson 2011).

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (transmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency).

- 1) Dimensi transmisi (transmission) menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Dimensi kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
- 3) Dimensi konsistensi (consistency) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

B. Sumber daya.

Mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan.

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program dirumuskan tanpa ada dukungan sumber daya yang memadai maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. Sumber daya yang dimaksudkan mencakup jumlah staff pelaksana yang memadai dengan keahlian yang memadai, informasi, wewenang atau kewenangan dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menjamin kebijakan dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan. Memadai yang dimaksudkan adalah jumlah para pelaksana harus sesuai dengan jumlah tugas yang dibebankan maupun kemampuannya, dan keterampilan yang dimiliki baik teknis maupun material. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi dari sumber daya adalah:

- 1) Jumlah staff atau pelaksana dan kemampuannya baik secara teknis maupun material
- 2) Dukungan fasilitas baik berupa dana maupun infrastruktur lainnya di lapangan
- 3) Wewenang para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan.

Bahwa sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan.

1) Sumber daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. sumber daya yang mungkin paling penting dalam implementasi kebijakan adalah staff.

2) Sumber daya Anggaran

Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas.

Terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program.

Menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah. (Widodo 2010:)

3) Sumber daya Peralatan

Bahwa sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. (Nugroho 1011)

4) Sumber daya Kewenangan

Sumber daya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa: Kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan.

Bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

C. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai "kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan". Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.(Widodo 2010)

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustino (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

1) Pengangkatan birokrat.

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih tinggi. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

2) Insentif

Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III seiring dengan apa yang dikemukakan oleh Meter and Horn, disposisi yang diartikan sebagai motivasi psikologis para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Menurutnya ada tiga hal

yang terdapat di dalam disposisi atau sikap pelaksana yang merupakan unsur penting dalam implementasi yaitu:

- a. Pemahaman dan pengetahuan para pelaksana terhadap kebijakan
- b. Arah respon dari para pelaksana terhadap pelaksana implementasi kebijakan (penerimaan dan penolakan)
- c. Intensitas dari respon
- d. Strukur birokrasi

Birokrasi merupakan struktur yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan, karena mempunyai pengaruh yang besar untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan.

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (implementors) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa "implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi". Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

Ada dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja birokrasi menurut George C Edward III (dalam Agustino, 2006:153-154) yaitu:

1) Standard Operational Procedures (SOP)

SOP adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) berdasarkan dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan masyarakat) dalam pekerjaannya.

2) Fragmentasi

Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan atau aktivitas kerja kepada beberapa pegawai dalam unit-unit kerja untuk mempermudah pekerjaan dan memperbaiki pelayanan.

2. METODE PENELITIAN

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Penelitian ini bersifat menjelaskan data hasil penelitian dalam bentuk kalimat secara lengkap, sistematis dan mudah dipahami serta diinterpretasikan agar dapat ditarik kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan kualitatif. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menganalisa data lalu menggambarkan tentang fenomena yang terjadi.(Sugiyono, 2011:247). Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisa data dapat dilakukan dalam beberapa tahap:

a. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2011:247) Reduksi data diartikan sebagai merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya mendisplaykan data. Sugiyono (2011:249) mengatakan bahwa penyajian data dilakukan setelah data direduksi. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Verifikasi dan Kesimpulan

Menurut Sugiyono (2011:253) Verifikasi dan kesimpulan ialah "Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori"

Menurut Sangadji (2010:210) penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagian kegiatan dari konfigurasi utuh. Kesimpulan diverifikasi selama kegiatan berlangsung. Verifikasi mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis suatu tinjauan ulang pada catatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap fenomena-fenomena yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam penelitian ini, mengenai implementasi program Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura yang terdiri dari 3 (empat) program kerja utama yaitu, Usaha Kios, Pantai wisata dan Peternakan hasil penelitian ini merupakan suatu data dan fakta yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan yaitu menggunakan teori Sumber Agustino Leo. 2008.

1. Standar dan sasaran Kebijakan :

Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

- a. Prosedur kerja yang jelas
- b. Program kerja
- c. Jadwal kegiatan

2. Sumberdaya:

Potensi yang dimiliki atau dari unsur tertentu :

- a. Alam
- b. Manusia
- c. Energi

3. Karakteristik agen pelaksana:

Pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan.

- a. Memiliki struktur organisasi
- b. Adanya sumberdaya manusia yang berkualitas
- c. Perlengkapan atau alat-alat kerja.

4. Disposisi Implementator :

Menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.

- a. Sesuai dengan peraturan
- b. Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan
- c. Sesuai dengan petunjuk teknis.

Berikut ini Penyajian data pada tiap-tiap tahapannya:

1. Standar Dan Sasaran Kebijakan

a. Prosedur kerja yang jelas

Prosedur kerja yang sudah ada harus memiliki prosedur kerja agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih, sehingga tidak bertentangan antara unit kegiatan yang terdapat di dalamnya. Pada BUMDes Kampung Holtekamp terdapat prosedur kerja yang jelas.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Viktor Baransano selaku Direktur BUMDes Holtekamp yang mengatakan bahwa:

“Sesuai dengan prosedur kerja yang jelas, seperti prosedurnya, kami, kami jelaskan teknisnya seperti apa, cara meminjamnya, cara mengasuhnya

seperti apa, terus kita beri persyaratan dalam bentuk selebaran, beliau tersebut peminjam membacanya kalau memang mereka menyetujui persyaratan tersebut otomatis beliau tanda tangani. kalau memang mereka tidak setuju dengan persyaratan kita ajukan bahwa peminjaman jumlah sekian harus ada argunan, otomatis mereka tidak setuju kan, kami tidak berani melepaskan gitu.” (wawancara tanggal 04 Agustus 2020).

Hal yang sama juga di katakana oleh Ibu Agustina Yambeyapo selaku Masyarakat kampung Holtekamp yang mengatakan bahwa:

“Kalau prosedurnya jelas, kaya ada yang pinjam yah jelas, sesuai dengan prosedur yang jelas.” (wawancara tanggal 04 Agustus 2020).

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa BUMDes Holtekamp sudah sesuai dengan prosedur kerja yang jelas, seperti bagaimana teknisnya seperti apa, caranya meminjamnya, cara mengasuhnya seperti apa, dan peminjam di berikan sebuah selebaran yang berisi persyaratan peminjaman, jika peminjam menyetujui maka BUMDes memberika pinjaman ke peminjam. Apa bila peminjam tidak menyetujui dengan persyaratan yang di berikan BUMDes, maka BUMDes tidak memberikan pinjaman kepada peminjam.

b. Program kerja

Program kerja harus sudah terprogram dan terencana dengan baik, sehingga tujuan program dapat direalisasikan dengan efektif. BUMDes Kampung Holtekamp memiliki program kerja yang sudah di buat Sejak terbentuknya BUMDes Kampung Holtekamp.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Viktor Baransano selaku Direktur BUMDes Kampung Holtekamp yang mengatakan bahwa:

“BUMDes Kampung Holtekamp memiliki program kerja, untuk sementara ini simpan usaha kios, untuk kedepanya kita ingin bergerak di bidang pertanian” (wawancara tanggal 04 Agustus 2020).

Hal yang sama juga di katakana oleh Ibu Oktovina Merauje selaku Masyarakat kampung Holtekamp yang mengatakan bahwa:

“BUMDes Kampung holtekamp memiliki program kerja, salah satunya ya Pantai wisata.” (wawancara tanggal 05 Agustus 2020).

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa BUMDes Holtekamp memiliki program kerja, seperti salah santunya usaha kios, namun sementara ini BUMDes Kampung Holtekamp belum bergerak di bidang pertanian, untuk harapan kedepanya BUMDes ingin bergerak di bidang pertanian.

c. Jadwal kegiatan

Jadwal kegiatan Program yang sudah ada harus dijadwalkan kapan dimulai dan diakhiri suatu program agar mudah dalam mengadakan evaluasi. Dalam hal ini yang diperlukan adanya tanggal pelaksanaan dan rampungnya sebuah program sudah ditentukan sebelumnya.

BUMDes Kampung Holtekamp sudah memiliki jadwal kegiatan, namun tidak tergantung dengan jadwal tersebut.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Husain selaku Kepala Kampung Holtekamp yang mengatakan bahwa:

“menurut dari jadwal kegiatan itu ada, jadi gini karna permodalan/peminjaman itu kan tidak sama bulan, ada bulan 1, ada bulan 2 kan ada jadwal kerjanya di situ, jadi itu ikutin dari yang ada. jadi kalau ada yang mau setor atau mau apa kan kita harus siap, di tanggal ini pada setor, kalau ada masuk ke kantor berarti ada yang setor...” (wawancara tanggal 05 Agustus 2020)

Hal yang sama juga di katakana oleh Bapak Viktor Baransan Kampung Holtekamp yang mengatakan bahwa:

“ada jadwal kegiatan, tetapi kita tidak berpatokan dengan jadwal yang saya bilang, kita bergerak hari-hari, setiap ada nasabah tetap kami jalan kan.” (wawancara tanggal 04 Agustus 2020)

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa BUMDes Kampung Holtekamp memiliki Jadwal kegiatan, akan tetapi tidak berpatokan pada jadwal yang ada, karena disesuaikan dengan yang datang meminjam atau pun menyeter

d. Faktor Mempengaruhi

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di lihat faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kampung Holtekamp ialah faktor pendukung dimana BUMDes Kampung Holtekamp sesuai dengan peraturan, petunjuk pelaksana, petunjuk teknis, dan memiliki prosedur kerja yang jelas.

2. Sumberdaya

a. Adanya sumber daya manusia yang berkualitas

Sumber daya manusia yang berkualitas berkaitan dengan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Aparatur dalam hal ini petugas yang terlibat dalam pelaksanaan program. Tugas aparat pelaksana program yang utama adalah memberikan pelayanan kepada

masyarakat yang dipercayakan kepadanya untuk mencapai tujuan negara. Agar tugas-tugas pelaksana program dapat dilaksanakan secara efektif maka setiap aparatur dituntut memiliki kemampuan yang memadai sesuai dengan bidang tugasnya. Pada BUMDes Kampung Holtekamp memiliki sumber daya manusia.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Husain selaku Kepala Kampung Holtekamp yang mengatakan bahwa:

“Saat manajemen BUMDes itu sendiri pengolahan BUMDes ya saya yakinkan sudah bisalah, jadi maksudnya untuk bikin laporan neracanya, SAU, laporan pertahunnya, laporan tahunan, itu sudah baguslah, karena yang duduk di situ memang paling rendah SMA, tapi Bendahara serjana juga. Jadi kalau saya bilang SDM sudah cukup lah, mengertilah.” (wawancara tanggal 05 Agustus 2020)

Hal yang sama juga di katakana oleh Ibu Oktovina Iyawa selaku Masyarakat kampung Kampung Holtekamp yang mengatakan bahwa:

“BUMDes sanggarai memiliki Sumber daya manusia yang cukup baik” (wawancara tanggal 05 Agustus 2020)

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Sumber daya manusia yang ada pada BUMDes Kampung Holtekamp cukup baik, dalam hal ini BUMDes Kampung Holtekamp dapat melaksanakan tugas-tugasnya cukup baik, dalam membuat laporan pertahun, dan laporan tahunan.

3. Karakteristik agent pelaksana

a. Memiliki struktur organisasi

Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk. Dalam hal ini, program BUMDes harus memiliki struktur organisasi yang jelas dan teratur, agar dapat berjalannya sebuah program dengan baik. Dalam hal ini BUMDes Kampung Holtekamp memiliki struktur organisasi. Seperti yang di kemukakan oleh Bapak Husain selaku Kepala kampung Holtekamp yang mengatakan bahwa:

“BUMDes Kampung Holtekamp memiliki stuktur organisasi, jadi struktur organisasi yang ada di kampung Holtekamp itu jelas sekarang ini baru pemula baru dibentuk, jadi struktur hanya ketua, sekretaris, dan bendahara. Belum ada seksi-seksi yang lain.” (wawancara tanggal 05 Agustus 2020)

Hal yang sama di sampaikan oleh Bapak Abraham Merauje selaku Ketua Bamuskam Kampung Holtekamp :

“Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kampung Holtekamp memiliki struktur organisasi.” (wawancara tanggal 05 Agustus 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di simpulkan BUMDes Kampung Holtekamp memiliki struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa, namun karena baru pemula atau baru dibentuk maka struktur organisasi BUMDes Kampung Holtekamp belum memiliki seksi-seksi atau Manajer unit usaha yang lain hanya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.

a. Perlengkapan atau alat kerja

Perlengkapan adalah barang-barang yang dimiliki BUMDes yang bersifat habis dipakai ataupun bisa berulang-ulang yang bentuknya relatif kecil dan pada umumnya melengkapai kebutuhan BUMDes. Sedangkan alat kerja BUMDes adalah alat ataupun bisa berbentuk tempat yang gunanya adalah untuk mendukung berjalanya BUMDes. Pada BUMDes Kampung Holtekamp terdapat perlengkapan alat kerja.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Husain selaku Kepala Kampung Holtekamp yang mengatakan bahwa:

“kalau ATK ada, terdapat Komputer, meja dan lain-lain, cuma sekretariatnya belum ada masih menumpang di kantor kampung. Kalau untuk memadai perlengkapan atau alat kerja sih belum, cuma karena modal awal ini terlalau minim toh jadi apa adanya dulu yang sudah ada yang penting bisa untuk kerja. Kalau memang butuh perlengkapan banyak dek, kan gitu cuma belum kita bisa cover semua karena baru pembentukan beberapa tahun.” (wawancara tanggal 05 Agustus 2020)

Hal yang sama juga di katakana oleh Bapak Antinius Inoto selaku sekretaris BUMDes Kampung Holtekamp yang mengatakan bahwa:

“memiliki perlengkapan atau alat kerja, yaitu ruang kerja beserta isinya, seperti komputer, print dan perlengkapan ATK.” (wawancara 06 Agustus 2020)

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa perlengkapan atau alat kerja pada BUMDes Kampung Holtekamp cukup memadai untuk kerja,

hanya saja sekretariat BUMDes Kampung Holtekamp masih menumpang di kantor kampung.

4. Interpretasi

a. Sesuai dengan peraturan

Sesuai dengan peraturan berarti setiap pelaksanaan kebijaksanaan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku baik Peraturan Tingkat Pusat, Propinsi, Kota BUMDes harus sesuai dengan peraturan yang berlaku baik Peraturan Tingkat Pusat, Propinsi, dan kota.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Abraham Merauje selaku Ketua Bamuskam Kampung Holtekamp yang mengatakan bahwa:

“Saya rasa sesuai saja karena ini baru awal bentuk, baru awal terbentuk, jadi saya katakan yaitu tadi butuh pembelajaran-pembelajaran kedepan, sayangnya sudah sesuai, kalau peraturan itu sudah sejak berdirinya karena sudah ada aturan-atuara dari pusat.” (wawancara tanggal 05 Agustus 2020)

Hal yang sama juga di katakana oleh Ibu Tabita Pemansi selaku Masyarakat kampung Kampung Holtekamp yang mengatakan bahwa:

“BUMDes Kampung Holtekamp sudah sesuai dengan peraturan.” (wawancara tanggal 29 Oktober 2019)

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa BUMDes Kampung Holtekamp aturan Pemerintah.

b. Sesuai dengan petunjuk pelaksana

Sesuai dengan petunjuk pelaksana berarti pelaksanaan kebijaksanaan dari peraturan sudah dijabarkan cara pelaksanaannya pada kebijaksanaan yang bersifat administratif, sehingga memudahkan pelaksana dalam melakukan aktifitas pelaksanaan program. BUMDes Kampung Holtekamp sesuai dengan petunjuk pelaksana dari peraturan yang ada pada BUMDes Kampung Holtekamp.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Antonius Inoto selaku Bendahara BUMDes Kampung Holtekamp yang mengatakan bahwa:

“Sudah sesuai dengan petunjuk pelaksana, ketika mulai terbentuk nanti laksanakan pasti sudah sesuai peraturan yang ada.” (wawancara tanggal 04 Agustus 2020)

Hal yang sama juga di katakana oleh Ibu Tabita Pemansi selaku Masyarakat kampung Holtekamp yang mengatakan bahwa:

“Sudah sesuai dengan petunjuk pelaksana, sesuai peraturannya.” (wawancara tanggal 06 Agustus 2020)

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa BUMDes Kampung Holtekamp sudah sesuai dengan petunjuk pelaksana, yang mana sudah sesuai peraturan yang ada pada BUMDes.

c. Sesuai petunjuk teknis

Sesuai dengan petunjuk teknis berarti kebijaksanaan yang sudah dirumuskan dalam bentuk petunjuk pelaksana dirancang lagi secara teknis agar memudahkan dalam operasionalisasi program. Petunjuk teknis ini bersifat strategis lapangan agar dapat berjalan efisien dan efektif, rasional dan realistis. Pada BUMDes Kampung Holtekamp sesuai dengan petunjuk teknis yang mana sudah dirumuskan dalam bentuk petunjuk pelaksana yang telah dirancang secara teknis dalam mengoperasikan program BUMDes Kampung Holtekamp.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Viktor Baransano selaku Direktur BUMDes Kampung Holtekamp yang mengatakan bahwa:

“Sudah sesuai dengan petunjuk teknis, kaya ada peminjam tersebut ya tetap kita kasih tau cara teknis bagaimana, peminjaman terus ansuranya bagaimana tetap kita kasih tau.” (wawancara tanggal 04 Agustus 2020).

Hal yang sama juga di katakana oleh Bapak yanto Mansi selaku Masyarakat kampung Holtekamp yang mengatakan bahwa:

“sesuai dengan petunjuk teknis yang ada.” (wawancara tanggal 06 Agustus 2020)

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa BUMDes Kampung Holtekamp sudah sesuai dengan petunjuk teknis, dimana ada peminjam, tersebut tetap di kasih tau cara teknis bagaimana, peminjaman, terus ansuranya bagaimana yang ada pada BUMDes Kampung Holtekamp.

d. Analisis Hasil/Pembahasan

Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang ada di desa. Dalam ini peneliti akan membahas tentang fokus penelitian, dimana berdasarkan tentang teori Implementasi program menurut Agustino Leo. 2008. Ada empat pilar yang mendukung keberhasilan untuk mengoperasikan sebuah program, yaitu: Standar dan sasaran kebijakan. Sumberdaya, Karakteristik agen pelaksana, dan Disposisi implementator. Berikut ini peneliti akan

membahas lebih lanjut terkait analisis hasil penelitian.

1. Standar Dan Sasaran Kebijakan

Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

a. Prosedur kerja yang jelas

Prosedur kerja yang jelas. Prosedur kerja yang sudah ada harus memiliki prosedur kerja agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih, sehingga tidak bertentangan antara unit kegiatan yang terdapat di dalamnya. Pada BUMDes Kampung Holtekamp sudah sesuai dengan prosedur kerja yang jelas, seperti bagaimana teknisnya seperti apa, caranya meminjamnya, cara mengasuhnya seperti apa, dan peminjam di berikan sebuah selebaran yang berisi persyaratan peminjaman, jika peminjam menyetujui maka BUMDes memberika pinjaman ke peminjam. Apa bila peminjam tidak menyetujui dengan persyaratan yang di berikan BUMDes, maka BUMDes tidak memberikan pinjaman kepada peminjam. Dalam hal ini BUMDes Kampung Holtekamp jelas.

b. Program kerja

Program kerja harus sudah terprogram dan terencana dengan baik, sehingga tujuan program dapat direalisasikan dengan efektif. Pada BUMDes Kampung Holtekamp memiliki program kerja, seperti salah santunya simpan pinjam, namun sementara ini BUMDes Kampung Holtekamp belum bergerak di bidang pertanian dan juga program wisata pemancingan, untuk harapan kedepanya BUMDes ingin bergerak di bidang pertanian dan juga wisata pemancingan.

c. Jadwal kegiatan

Jadwal kegiatan Program yang sudah ada harus dijadwalkan kapan dimulai dan diakhiri suatu program agar mudah dalam mengadakan evaluasi. Dalam hal ini yang diperlukan adanya tanggal pelaksanaan dan rampungnya sebuah program sudah ditentukan sebelumnya. Namun pada BUMDes Kampung Holtekamp sudah memiliki jadwal kegiatan, akan tetapi tidak tergantung dengan jadwal kegiatan tersebut. karena disesuaikan dengan nasabah yang datang meminjam atau pun menyeter pada BUMDes Kampung Holtekamp.

d. Faktor Mempengaruhi

Dari analisis hasil atau pembahasan dapat dilihat faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kampung Holtekamp ialah faktor pendukung dimana BUMDes Kampung Holtekamp sesuai dengan peraturan, sesuai petunjuk pelaksana, sesuai petunjuk teknis, dan memiliki prosedur kerja yang jelas. Sedangkan faktor penghambat ialah Sumber daya manusia yang masih kurang karena BUMDes Kampung Holtekamp tidak terdapat Manajer unit usaha yang bertanggung jawab untuk menjalankan program-program BUMDes dan tidak terdapat sekretariat BUMDes.

2. Sumberdaya

Sumber daya adalah sesuatu yang memiliki nilai guna. Sumber Daya Alam (SDA) adalah keseluruhan faktor fisik, kimia, biologi dan sosial yang membentuk lingkungan sekitar kita. Hunker dkk menyatakan bahwa sumber daya alam adalah semua yang berasal dari bumi, biosfer, dan atmosfer, yang keberadaannya tergantung pada aktivitas manusia. Semua bagian lingkungan alam kita (biji-bijian, pepohonan, tanah, air, udara, matahari, sungai) adalah sumber daya alam.

SDA adalah unsur-unsur yang terdiri dari SDA nabati (tumbuhan) dan SDA hewani (satwa) dengan unsur non hayati disekitarnya yang secara keseluruhan membentuk ekosistem SDA memiliki peranan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Secara yuridis, pengertian SDA termuat dalam Pasal 1 ayat 9 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ialah SDA adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pembuatan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan.

a. Memiliki struktur organisasi

Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk. Dalam hal ini, program BUMDes harus memiliki struktur organisasi yang jelas dan teratur. Pada BUMDes Kampung Holtekamp memiliki struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa, namun karena baru pemula atau baru dibentuk maka struktur organisasi BUMDes Kampung Holtekamp belum memiliki seksi-seksi

atau Manajer-manajer unit usaha yang lain hanya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.

b. Adanya sumber daya manusia yang berkualitas

Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas berkaitan dengan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Aparatur dalam hal ini petugas yang terlibat dalam pelaksanaan program. Tugas aparat pelaksana program yang utama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dipercayakan kepadanya untuk mencapai tujuan negara. Agar tugas-tugas pelaksana program dapat dilaksanakan secara efektif maka setiap aparatur dituntut memiliki kemampuan yang memadai sesuai dengan bidang tugasnya. Sumber daya manusia yang ada pada BUMDes Kampung Holtekamp cukup baik, dalam hal ini BUMDes Kampung Holtekamp dapat melaksanakan tugas-tugasnya cukup baik, dalam membuat laporan neraca, SAU, laporan pertahun, dan laporan tahunan.

c. Perlengkapan atau alat kerja

Dalam hal ini juga perlu adanya Perlengkapan atau alat kerja. Perlengkapan adalah barang-barang yang dimiliki BUMDes yang bersifat habis dipakai ataupun bisa berulang-ulang yang bentuknya relatif kecil dan pada umumnya melengkapi kebutuhan BUMDes. Sedangkan alat kerja BUMDes adalah alat ataupun bisa berbentuk tempat yang gunanya adalah untuk mendukung berjalannya BUMDes. Pada perlengkapan atau alat kerja pada BUMDes Kampung Holtekamp cukup memadai untuk kerja seperti komputer, print dan perlengkapan ATK, hanya saja sekretariat BUMDes Kampung Holtekamp masih numpang di kantor kampung.

4. Interpretasi

Menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.

a. Sesuai dengan peraturan

Sesuai dengan peraturan. Sesuai dengan peraturan berarti setiap pelaksanaan kebijaksanaan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku baik Peraturan Tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten. Dalam hal ini BUMDes Kampung Holtekamp sudah sesuai peraturan yang ada dalam peraturan Pemerintah.

b. Sesuai dengan petunjuk pelaksana

Sesuai dengan petunjuk pelaksana. Sesuai dengan petunjuk pelaksana berarti pelaksanaan kebijaksanaan dari peraturan sudah dijabarkan cara pelaksanaannya pada kebijaksanaan yang bersifat administratif, sehingga memudahkan pelaksana dalam melakukan aktifitas pelaksanaan program. Pada BUMDes Kampung Holtekamp sudah sesuai dengan petunjuk pelaksana, yang mana sudah sesuai peraturan yang ada pada Pemerintah.

c. Sesuai petunjuk teknis

Sesuai petunjuk teknis. Sesuai dengan petunjuk teknis berarti kebijaksanaan yang sudah dirumuskan dalam bentuk petunjuk pelaksana dirancang lagi secara teknis agar memudahkan dalam operasionalisasi program. Petunjuk teknis ini bersifat strategis lapangan agar dapat berjalan efisien dan efektif, rasional dan realistis. Pada BUMDes Kampung Holtekamp sudah sesuai dengan petunjuk teknis, Kampung Holtekamp Kampung Holtekamp sehingga dapat di lihat BUMDes Kampung Holtekamp sudah sesuai dengan petunjuk petunjuk teknis.

4. KESIMPULAN.

Setelah penulis memaparkan pembahasan tentang Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Peran dan Kontribusi BUMDes Kampung Holtekamp dalam mensejahterakan masyarakat telah diwujudkan dengan adanya unit-unit usaha yang ada didalamnya seperti unit usaha sektor riil yaitu penyediaan alat-alat sembako, dan juga kontribusi yang diberikan BUMdes baik itu terhadap PADes maupun kepada masyarakat seperti pengadaan seminar maupun penyuluhan tentang kewirausahaan. hanya saja jika dilihat dari 5 indikator kesejahteraan yaitu pendapatan, pendidikan, kesehatan, pengeluaran maupun perumahan masyarakat, peran maupun kontribusi BUMDes Kampung Holtekamp ini masih belum dikatakan maksimal sehingga kesejahteraan di Kampung Holtekamp ini belum merata bagi sebagian masyarakat masih adanya ketimpangan antar masyarakat Kampung Holtekamp.

Peran dan Kontribusi BUMdes terhadap kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur berdasarkan materi saja tetapi juga non materi. Dana pinjaman dan Penyediaan sembako maupun

pelayanan yang diberikan BUMDes Kampung Holtekamp adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Hal ini merupakan sifat saling tolong menolong sesama dan tentunya sesuai dengan tujuan itu sendiri maka Kamppung Holtekamp sudah dapat dikatakan sejahtera dalam pandangan karena telah dapat memenuhi kebutuhan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- AG, Subarsono. 2008. Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Coulter dan S, M Robbins. 2007, Manajemen. Edisi kedelapan, Jakarta :PT. Indeks.
- Ibrahim. 2018. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kawasan Tambang. Yogyakarta: leutikaprio.
- Isril, mhd Dan Taufik. 2013. Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa. Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 2.
- Joko, Widodo. 2010. Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media.
- Leo, Agustino. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
- . 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
- Pearson Wayne. 2011. Public policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakaarta: Kencana Prenada Media Group
- Nugroho Riant. 2011. Public Policy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Lexy Moleong J. 2014. Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Riwuh Josep Kaho, 2003. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. PT. Rajawali Graf-indo Persada, Jakarta.
- Setiawan Guntur, 2004 Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Bandung: Remaja Ro2`11sdakarya.
- Soenarko. 2005. Public Policy: Pengertian Pokok untuk Memahami dan Menganalisa Kebijaksanaan Pemerintah. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sopiah, Mamang, Etta. Sangadji. 2010. Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.